

Peran Infrastruktur dan Lembaga Ekonomi Terhadap Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir (Studi pada Kabupaten Bengkalis)

Aminah Mukarromah^{1*}, Taryono², Yunika Nuuru Afriza³, Oktavia Nada Ramadani⁴, Aulia Despiandra⁵, Intan Pusparini⁶

¹⁻⁶Universitas Riau, HR. Soebrantas Km. 12,5, Pekanbaru, Provinsi Riau

E-mail: aminah.mukarromah3028@student.unri.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3655>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 31 Oct 2025

Revised: 06 Nov 2025

Accepted: 17 Nov 2025

Kata Kunci:

Infrastruktur, Lembaga Ekonomi, Desa Pesisir, SDGS Desa, Kebijakan Pembangunan

Keywords:

Infrastructure, Economic Institutions, Coastal Villages, Village SDGS, Development Policy



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh infrastruktur dan lembaga ekonomi terhadap implementasi kebijakan pembangunan desa pesisir di Kabupaten Bengkalis, khususnya dalam mendukung pencapaian indikator *Desa Peduli Lingkungan Laut* (SDGs 14). Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif-verifikatif dengan data sekunder yang bersumber dari Indeks Desa Membangun (IDM) dan SDGs Desa tahun 2024. Analisis data dilakukan melalui uji korelasi Pearson dan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan antara variabel kualitas jalan (X_1) dan lembaga ekonomi (X_2) terhadap skor *Desa Peduli Lingkungan Laut* (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik variabel kualitas jalan maupun lembaga ekonomi tidak berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap implementasi kebijakan pembangunan desa pesisir, dengan nilai signifikansi masing-masing 0,742 dan 0,403 serta R^2 sebesar 0,0088. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain seperti partisipasi masyarakat, dukungan kebijakan lokal, dan kapasitas sosial budaya memiliki peranan yang lebih besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, serta integrasi antara pembangunan infrastruktur dan ekonomi biru untuk mendukung pembangunan pesisir yang berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis.

This study aims to analyze the influence of infrastructure and economic institutions on the implementation of coastal village development policies in Bengkalis Regency, particularly in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) indicator of Ocean Care Village (SDGs 14). The research employs a quantitative descriptive-verification approach using secondary data obtained from the Village Development Index (IDM) and Village SDGs 2024 datasets. Data analysis was conducted through Pearson correlation and multiple linear regression tests to examine both partial and simultaneous effects of road quality (X_1) and economic institutions (X_2) on the Ocean Care Village score (Y). The results reveal that neither road quality nor economic institutions have a significant effect, either partially or simultaneously, on the implementation of coastal village development policies, with significance values of 0.742 and 0.403, and an R^2 value of 0.0088. These findings indicate that other factors, such as community participation, local policy support, and sociocultural capacity, play a more dominant role in policy implementation. The study emphasizes the importance of strengthening governance, enhancing community capacity, and integrating infrastructure development with the blue economy approach to achieve sustainable coastal development in Bengkalis Regency.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Silvana Enjelina Bander, et al (2025). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau dari *Self Confidence* Siswa SMK Dharma Bakti Bitung, 4(2) 10049-10054. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3655>

PENDAHULUAN

Kualitas infrastruktur dan kekuatan lembaga ekonomi desa merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan wilayah, terutama di kawasan pesisir yang rentan terhadap ketimpangan akses dan pelayanan publik. Pembangunan jalan desa menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menekankan peningkatan konektivitas antarwilayah (Subianto et al., 2025).

Infrastruktur jalan yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas barang dan jasa, tetapi juga memperkuat tata kelola pembangunan dan efektivitas kebijakan pemerintah di tingkat desa (Suparno, 2023). Sementara itu, lembaga ekonomi seperti koperasi dan kelompok usaha masyarakat berperan penting dalam memperkuat partisipasi warga dan menciptakan kemandirian ekonomi lokal (Muallif, 2024).

Di Kabupaten Bengkalis, pembangunan desa pesisir menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024, skor rata-rata kualitas jalan di desa pesisir mencapai 5,0, menunjukkan variasi dalam aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Skor lembaga ekonomi desa tercatat 3,3, mengindikasikan masih lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Di sisi lain, SDGs Desa indikator “Desa Peduli Lingkungan Laut” menunjukkan rata-rata skor 0,50, yang mencerminkan masih terbatasnya implementasi kebijakan pembangunan lingkungan berkelanjutan di tingkat desa (Sistem Informasi Desa, 2025).

Meskipun infrastruktur dan lembaga ekonomi telah menjadi fokus kebijakan desa, namun belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana kedua aspek tersebut secara simultan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan desa pesisir, terutama dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Penelitian sebelumnya cenderung membahas konservasi laut atau penguatan ekonomi desa secara terpisah (Anif Fatma Chawa, 2020).. Padahal, sinergi antara infrastruktur jalan yang memadai dan lembaga ekonomi yang kuat berpotensi meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan, termasuk program Desa Peduli Lingkungan Laut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara rancangan kebijakan nasional dan realisasi di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh skor kualitas jalan dan skor lembaga ekonomi terhadap implementasi kebijakan pembangunan desa pesisir yang diukur melalui skor Desa Peduli Lingkungan Laut di Kabupaten Bengkalis. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana pengaruh kualitas jalan terhadap skor Desa Peduli Lingkungan Laut; (2) bagaimana pengaruh lembaga ekonomi terhadap skor Desa Peduli Lingkungan Laut; dan (3) bagaimana pengaruh keduanya secara simultan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan desa pesisir. Data yang digunakan bersumber dari Indeks Desa Membangun (IDM) dan SDGs Desa tahun 2024, yang diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan desa pesisir yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif, yang bertujuan menilai pengaruh infrastruktur dan kelembagaan ekonomi terhadap implementasi kebijakan pembangunan desa pesisir di Kabupaten Bengkalis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual variabel yang diteliti serta menguji hubungan dan pengaruh antar variabel berdasarkan data sekunder.

Penelitian dilaksanakan pada September-Oktober 2025 dengan lokasi kajiannya di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Indeks Desa Membangun (IDM) dan Sustainable Development Goals (SDGs) desa Kabupaten Bengkalis tahun 2024. Data tersebut mencakup variabel skor kualitas jalan, skor lembaga ekonomi, dan skor desa peduli lingkungan laut.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan pengunduhan dari portal resmi Kementerian, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis melalui laporan IDM 2024 dan SDGs Desa 2024.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif Statistik, untuk menggambarkan karakteristik variabel penelitian melalui nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan simpangan baku.
2. Analisis Korelasi Person, untuk mengetahui apakah infrastruktur (skor kualitas jalan) dan lembaga ekonomi memiliki hubungan linier dengan implementasi kebijakan pembangunan desa pesisir sebelum dilakukan regresi, dengan persamaan:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}} \dots\dots\dots (1)$$

3. Analisis Regresi Linier Berganda, untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Model yang digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan: Y merupakan skor Desa Peduli Lingkungan Laut, α adalah konstanta, β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi masing-masing variabel bebas, dan ε adalah error atau residual. Uji statistik yang digunakan meliputi uji-t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, uji-F untuk mengetahui pengaruh simultan kedua variabel bebas terhadap variabel terikat, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur besarnya proporsi variasi skor Desa Peduli Lingkungan Laut yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah yang mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas 7.793,93 km² yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan Internasional menuju ke Selat Malaka. Posisi geografis ini menjadikan Bengkalis sebagai daerah dengan potensi kelautan yang tinggi, baik dalam sektor perikanan tangkap, budidaya laut, maupun perdagangan maritim. Selain itu, wilayah ini memiliki sejumlah desa pesisir dan pulau kecil yang secara sosial ekonomi bergantung pada sumber daya laut. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2024), kabupaten ini terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, termasuk Pulau Bengkalis dan Pulau Rupa, yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada aktivitas pesisir dan laut seperti penangkapan ikan, budidaya laut, serta perdagangan hasil perikanan.

Sebagai wilayah pesisir strategis, Bengkalis memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru (*blue economy*), terutama di bidang perikanan tangkap, budidaya laut, pengolahan hasil perikanan, serta pariwisata bahari. Namun, di sisi lain, kondisi geografis pesisir juga menjadikan Bengkalis menghadapi tantangan lingkungan yang cukup kompleks. Beberapa permasalahan utama yang sering muncul di daerah ini antara lain abrasi pantai, pencemaran laut akibat aktivitas pelayaran dan industri, serta degradasi ekosistem mangrove. Berdasarkan data *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis*, abrasi di beberapa wilayah pesisir seperti Pulau Rupa dan Kecamatan Bantan terus meningkat dari tahun ke tahun, mengancam pemukiman penduduk dan lahan pertanian di sekitar pantai (Click or tap here to enter text.).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan laut di Kabupaten Bengkalis sangat relevan dengan pencapaian *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)*, khususnya SDGs 14:Desa Peduli Lingkungan Laut. Berdasarkan data SDGs 14 Desa Bengkalis menunjukkan capaian yang bervariasi antar desa, dengan nilai umum berkisar antara 33,33% hingga 50%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian desa telah memiliki kesadaran dan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan laut, meskipun masih terdapat desa yang belum mencapai standar optimal. Indikator ini mencerminkan sejauh mana desa pesisir memiliki peraturan desa, program perlindungan lingkungan laut, dan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan sebagaimana yang ditetapkan oleh *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi* (Click or tap here to enter text.).

Relevansi antara kondisi wilayah Bengkulu dengan SDGs 14 memperlihatkan bahwa penguatan infrastruktur dan lembaga ekonomi lokal memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan desa pesisir. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan kecil, jaringan listrik, fasilitas penyimpanan ikan, serta sarana komunikasi berperan dalam memperlancar aktivitas ekonomi pesisir sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya laut. Di sisi lain, lembaga ekonomi seperti koperasi nelayan, kelompok pembudidaya ikan, dan lembaga keuangan mikro desa menjadi wadah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pengawasan terhadap praktik pengelolaan laut yang berkelanjutan. Dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah melalui perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran, sebagaimana tercantum dalam program Bappeda Kabupaten Bengkulu, juga menjadi faktor kunci dalam mendorong keberhasilan pembangunan desa pesisir secara berkelanjutan.

Table 1. Hasil uji korelasi pearson antar variabel penelitian

Variabel	Y (Desa Peduli Laut)	X1 (Kualitas Jalan)	X2 (Lembaga Ekonomi)
Y (Desa Peduli Laut)	1,000	0,12	0,15
X1 (Kualitas Jalan)	0,12	1,000	0,28
X2 (Lembaga Ekonomi)	0,15	0,28	1,000

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas jalan (X1) dengan skor Desa Peduli Lingkungan Laut (Y) hanya sebesar 0,12, yang termasuk kategori hubungan sangat lemah. Demikian juga korelasi antara lembaga ekonomi (X2) dengan Y sebesar 0,15. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel independen memiliki keterkaitan yang lemah terhadap variabel dependen, sehingga konsisten dengan hasil regresi yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan.

Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 2. Persamaan model yang diperoleh adalah:

$$Y = 20,33 + 1.07X_1 + 1.08X_2 \dots\dots\dots(2)$$

Tabel 2. Hasil analisis regresi linier berganda

Variabel	Koefisien (β)	t-hitung	Sig. (P-value)	Keterangan
(Konstanta)	20,331	1,135	0,259	Tidak signifikan
Skor Kualitas Jalan (X1)	1,075	0,33	0,742	Tidak signifikan
Skor Lembaga Ekonomi (X2)	1,817	0,839	0,403	Tidak signifikan

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel kualitas jalan (X1) dan lembaga ekonomi (X2) memiliki nilai signifikan masing-masing 0,742 dan 0,403, keduanya lebih besar dari 0,05. Artinya, secara parsial kedua variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap skor Desa Peduli Lingkungan Laut (Y). Selanjutnya, hasil uji simultan menggunakan ANOVA ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil uji ANOVA (uji F) regresi linier berganda

Sumber Variasi	df	SS	MS	F-hitung	Sig.
Regresi	2	405,81	202,9	0,401	0,67
Residual	90	45.488,86	505,43		
Total	92	45.894,66			

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai F-hitung sebesar 0,401 dengan signifikan 0,670(>0,05). Hal ini berarti secara simultan variabel kualitas jalan dan lembaga ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap skor Desa Peduli Lingkungan Laut. Nilai koefisien determinasi (R²) hanya sebesar 0,0088, yang menunjukkan bahwa kedua variabel independen hanya mampu menjelaskan 0,88% variasi pada variabel dependen. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor lain di luar model lebih dominan dalam menentukan keberhasilan program Desa Peduli Lingkungan Laut.

Partisipasi masyarakat, dukungan kebijakan lokal, serta faktor sosial budaya masyarakat pesisir kemungkinan berperan lebih besar dibandingkan infrastruktur jalan atau keberadaan lembaga ekonomi. Fenomena ini sejalan dengan konsep omitted variabel bias (Gujarat, 2012), ketika variabel penting yang tidak dimasukkan dalam model menyebabkan pengaruh variabel yang diuji menjadi lemah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kualitas jalan maupun lembaga ekonomi belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Desa Peduli Lingkungan Laut di Kabupaten Bengkalis. Secara teoritis, infrastruktur dan kelembagaan merupakan elemen penting dalam administrasi pembangunan karena berperan dalam memperlancar aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan (Osborne & Gaebler, 1992). Namun, dalam konteks Bengkalis yang merupakan wilayah pesisir strategis di Provinsi Riau, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Akses jalan yang terbatas di beberapa desa pesisir serta peran lembaga ekonomi lokal yang belum optimal dalam mendorong kegiatan ekonomi berbasis kelautan menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan desa yang peduli terhadap lingkungan laut.

Temuan ini sejalan dengan konsep *policy implementation gap* yang dikemukakan oleh Birkland (Birkland, 2020), yaitu situasi di mana kebijakan pembangunan tidak selalu menghasilkan dampak yang diharapkan akibat lemahnya koordinasi antaraktor dan rendahnya kapasitas kelembagaan lokal. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan desa pesisir di Bengkalis telah berjalan melalui program-program SDGs Desa, termasuk Desa Peduli Lingkungan Laut SDGs ke-14, namun hasilnya belum maksimal karena kurangnya integrasi antara penguatan infrastruktur fisik, pengembangan kelembagaan ekonomi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pembangunan pesisir di Bengkalis perlu diperkuat melalui peningkatan tata kelola, sinergi antarinstansi, serta pemberdayaan masyarakat pesisir agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara nyata.

Secara praktis, hasil ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, pemerintah daerah perlu menajamkan regulasi dan perencanaan pembangunan desa yang berpihak pada pengelolaan sumber daya laut melalui penerbitan peraturan desa (Perdes) atau keputusan kepala desa yang mendukung kegiatan konservasi dan mitigasi pencemaran laut. Kedua, kapasitas lembaga ekonomi lokal seperti koperasi nelayan, BUMDes, dan kelompok usaha masyarakat perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, terutama dalam aspek pengelolaan lingkungan laut dan ekonomi biru (*blue economy*). Ketiga, peran serta masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pembangunan desa. Keempat, infrastruktur yang dibangun sebaiknya tidak hanya berfokus pada akses darat, tetapi juga pada infrastruktur pendukung kegiatan maritim seperti dermaga, fasilitas pengolahan hasil laut, dan sarana konservasi ekosistem pesisir. Kelima, evaluasi berkelanjutan berbasis data SDGs Desa perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan benar-benar selaras dengan tujuan SDGs 14, yakni melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir.

Hasil ini juga mengindikasikan bahwa faktor sosial dan kelembagaan memiliki peran yang lebih besar dibandingkan faktor fisik semata. Artinya, keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan desa pesisir tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial-ekologis yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, lembaga lokal, dan masyarakat. Pendekatan ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis yang rentan terhadap perubahan lingkungan, abrasi pantai, dan degradasi ekosistem laut.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas jalan dan lembaga ekonomi terhadap capaian Desa Peduli Lingkungan Laut di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, kedua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan nilai signifikansi masing-masing 0,742 dan 0,403, serta nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,0088. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh infrastruktur jalan dan kelembagaan ekonomi terhadap keberhasilan program lingkungan laut masih sangat rendah.

Secara teoritis, arah koefisien yang positif menandakan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dan penguatan kelembagaan tetap berpotensi mendukung pembangunan pesisir yang berkelanjutan, meskipun pengaruhnya belum signifikan secara statistik. Kondisi ini mengindikasikan adanya *implementation gap* dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan desa pesisir. Faktor-faktor sosial seperti kesadaran masyarakat, partisipasi publik, dukungan kebijakan daerah, serta kapasitas

kelembagaan lokal diduga memiliki peran yang lebih besar dalam mendorong keberhasilan pengelolaan lingkungan laut di Kabupaten Bengkalis.

Dengan demikian, pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDG) 14 di Bengkalis memerlukan strategi yang lebih integratif. Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antara pembangunan infrastruktur fisik, penguatan lembaga ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesadaran sosial-lingkungan agar kebijakan pembangunan desa pesisir dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Anif Fatma Chawa,. (2020). Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal Non-Perikanan Di Pulau Giligenting, Sumenep, Madura. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(4).
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis.
- Birkland, T. A. (2020). *An Introduction to the Policy Process Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (T. A. Birkland, Ed.). Roudledge.
- Gujarat, D. N. (2012). *Basic Economics*.
- Muallif. (2024, October 15). *Lembaga Ekonomi: Pengertian, Fungsi, dan Perannya dalam Kehidupan Sosial*. Universitas Islam An Nur Lampung.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley (D. Osborne & T. Gaebler, Eds.).
- Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (2024). *Laporan Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024*. Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Bappeda Kabupaten Bengkalis.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. (2020).
- Sistem Informasi Desa. (2025, September 29). *IDM dan SDGS Desa*. Sistem Informasi Desa.
- Subianto, P., Strategi, B., & Bangsa, T. (2025). *Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*.
- Suparno,. (2023). *Analisa Kerusakan Jalan Kabupaten Ruas Klampok – PG Banjaratma Kabupaten Brebes*. 1(1).